

**KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK
MERAHASIAKAN ISI AKTA DIKAITKAN DENGAN
PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Kenotariatan**



Luciana Eveline, S.H
NPM :0706177665

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
JUNI 2010**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun ditujuk telah
saya nyatakan dengan benar.

Nama : Luciana Eveline

NPM : 0706177665

Tanda Tangan :

Tanggal :

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Luciana Eveline

NPM : 0706177665

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis :

KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MERAHASIAKAN ISI AKTA DIKAITKAN
DENGAN PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Chairunnisa Said Selenggang, S.H., M.Kn (.....)

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H (.....)

Penguji : Dr Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal :

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMI

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Luciana Eveline
NPM : 0706177665
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non Exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MERAHASIAKAN ISI AKTA DIKAITKAN DENGAN PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal :

Yang menyatakan :



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Luciana Eveline

NPM : 0706177665

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis :

KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MERAHASIAKAN ISI AKTA DIKAITKAN
DENGAN PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing: Chairunnisa Said Selenggang, S.H., M.Kn (.....)

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H (.....)

Penguji : Dr Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A (.....)

Ditetapkan di: Depok

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah berkenaan melimpahkan berkat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penulisan tesis ini dilaksanakan sebagai bagian dari kewajiban penulis sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Universitas Indonesia. Tesis ini berjudul **“Kewajiban Notaris Untuk Merahasiakan Isi Akta dikaitkan Dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”**. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dosen Pembimbing Tesis, **Ibu Chairunnisa Said Selenggang, SH., Mkn** atas waktu, tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan dalam penulisan tesis ini.
2. Dewan Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta jajarannya.
3. Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, **Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH., MH** beserta jajarannya.
4. Seluruh Dosen pengajar di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Seluruh staf administrasi sekretariat di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
6. Orang tua penulis, mama dan papa yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Terima kasih untuk bantuan moril maupun materiil yang tak terhingga. Segala pencapaian yang penulis dapatkan hingga saat ini tidak akan ada tanpa restu dan doa dari Orang tua penulis.
7. Marcos Panjaitan, Suamiku yang tercinta, yang telah mendampingi dan memberikan waktu, perhatian dan kasih sayang selama penulisan tesis ini.

8. Rafael Panjaitan dan Jeremmy Panjaitan, kedua Permata dan Pelita Hidupku, yang telah mendampingi penulis setiap malam dalam menyelesaikan penulisan tesis ini dan terima kasih untuk pengertian anak-anakku sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Daniel Tobing dan Irene Tobing, saudara-saudara penulis yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis selama kuliah di Universitas Indonesia.
10. Sahabat-sahabat penulis, Ade, Yuni, Ravina, Eveline, Putri, Dewi, Mbak Icha, Mba Dina, Ilham, Joe, Agung serta seluruh teman-teman angkatan 2007 mahasiswa program studi Magister Kenotariatan.

Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan yang penulis miliki, sehingga penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Karenanya penulis dengan bebas hati menerima kritik dan saran guna perbaikan Tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Tuhan Yesus memberikan balasan yang lebih kepada mereka semua dan semoga tesis ini dapat menjadi sumbangsih pada almamater dan dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Terima Kasih.

ABSTRAK

Nama : Luciana Eveline

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : **KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MERAHASIAKAN ISI AKTA DIKAITKAN DENGAN PASAL 66 UU NO 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**

Ketentuan Pasal 66 UUDN telah menegaskan bahwa penyidik wajib untuk meminta persetujuan MPD sebelum memanggil notaris untuk dimintai keterangan dan sebelum memeriksa protokol notaris sehubungan dengan suatu kasus tertentu. Pengaturan ini berdasarkan pada sifat kerahasiaan yang melekat pada jabatan notaris sebagai pejabat umum. Tetapi dalam praktik sering terjadi pemanggilan notaris untuk diminta keterangan dan pemeriksaan protokol notaris tidak berdasarkan persetujuan MPD. Akibatnya terjadi masalah yang menimbulkan ketidakpastian hukum, misalnya apakah persetujuan MPD tersebut merupakan suatu keharusan, apakah kewajiban untuk merahasiakan isi akta merupakan suatu kewajiban yang mutlak bagi notaris dan bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada notaris yang memberikan keterangan kepada penyidik. Adapun tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk memahami keharusan bagi penyidik untuk meminta persetujuan MPD sebelum meminta keterangan dari notaris dan memeriksa protokol notaris. Kedua, untuk mengetahui dan memahami kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta. Ketiga, untuk mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris yang memberikan keterangan kepada penyidik.

Kata kunci : Kewajiban notaris dikaitkan dengan pasal 66 UU No 30 Tahun 2004

ABSTRACT

Name : Luciana Eveline

Study Programs : Public Notary

Title : **OBLIGATION TO KEEP CONFIDENTIAL THE CONTENTS OF NOTARIAL DEED WAS ASSOCIATED WITH ARTICLE 66 OF LAW NO. 30 YEAR 2004 ABOUT THE NOTARY FUNCTION**

Article 66 The Rule of Notary has confirmed that investigator obliged to ask permission from Area Supervisor Attorney before asking descriptions from notary and before checking notary's protocols. The rule above based on nature of secret sticks on notary function as public functionary. But in practices it is almost not happened. This problems rises legal uncertainty, such as: an investigator's obligation to asking permission a compulsion or not, is notary's obligation to keep agreement substance must be defended or not, how is legal protection to notary who giving description to investigator. The goals of this research namely: First, to understand about investigator's obligation to ask permission from Area Supervisor Attorney before asking description from notary. Second, to understand about the notary's obligation to keep agreement substances. Third, to understand about legal protection to notary who gives descriptions to investigators.

Key word: Notary public liability associated with article 66 of law no 30 year 2004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	6
1.3. Metode Penelitian.....	6
1.4. Sistematika Penulisan	8

BAB 2 PEMBAHASAN

2.1. Pemanggilan Terhadap Notaris Harus Berdasarkan Persetujuan MPD.....	9
2.1.1. Pemanggilan Terhadap Notaris Tanpa Persetujuan MPD Dalam Praktik	24
2.1.2. Kewajiban Penyidik Untuk Meminta Ijin MPD Sebelum Meminta Keterangan Dari Notaris dan Memeriksa Protokol Notaris Dalam Praktik.....	28
2.2. Kewajiban Notaris Untuk Merahasiakan Isi Akta.....	32
2.2.1. Pelaksanaan Kewajiban Notaris Untuk Merahasiakan Isi Akta.....	37
2.2.2. Penegakan Hukum Terhadap Kewajiban Notaris Untuk Merahasiakan Isi Akta.....	42
2.3. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Memberikan Keterangan Kepada Penyidik.....	50
2.3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Merahasiakan Isi Akta Terkait Dengan Pasal 66 UUJN.....	56

BAB 3 PENUTUP

3.1. Kesimpulan.....	61
3.2. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA.....	63
---------------------	----

LAMPIRAN